



PETA PROSES BISNIS

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
TAHUN 2024-2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2024
TANGGAL : 2024

PETA PROSES BISNIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

I. Kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD NTT Tahun 2005 - 2025

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahap keempat dan isu strategis aktual. Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan Lingkungan;
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2013 – 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJPD tahapan ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing didukung oleh SDM berkualitas.

Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala; peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menciptakan daya saing global.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

1. IPM mencapai angka 80;
2. Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80;
3. AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH;
4. Kemiskinan 12%;
5. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%;
6. Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-
7. Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat;
8. Good governance dan penegakan hukum dan HAM;
9. Pembangunan yang responsif gender;
10. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi sebagai mana amanat RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi pembangunan jangka panjang tersebut menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan

NTT 2024-2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD, analisa sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, isu strategis actual serta mengacu pada RPJMN dan RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 melalui RPD tahun 2024-2026. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah;
2. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian;
3. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan;
4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja;
5. Meningkatkan daya beli masyarakat;
6. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat;
8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah;
9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial;
10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing;
12. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan;
13. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
14. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah;
15. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim;
16. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, akuntabel, Kompeten, Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

II. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan tujuan pertama sasaran kedua, yaitu “Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian”.

Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 “Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia” dengan tujuan Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan bagian dari salah satu sasaran yaitu Terciptanya Lapangan Kerja; merupakan sasaran pembangunan provinsi dengan strategi yang terkait pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah peningkatan produktivitas angkatan kerja melalui:

- Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan
- Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses program - program peningkatan keahlian.

Dari strategi RPJPD tersebut dijabarkan pada tujuan dan sasaran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada pertumbuhan ekonomi dengan sasaran peningkatan kualitas SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui standarisasi keahlian profesi. Permasalahan pembangunan dalam RPD terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan akar masalah adalah belum optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan isu strategis Meningkatkan peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian, indikator yang mencakup isu tersebut adalah:

- Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
- Lama Tinggal Wisatawan(hari)
- Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (%)

III. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada unsur pelaksana bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas dan fungsi yang diberikan sebagai berikut :

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
2. Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

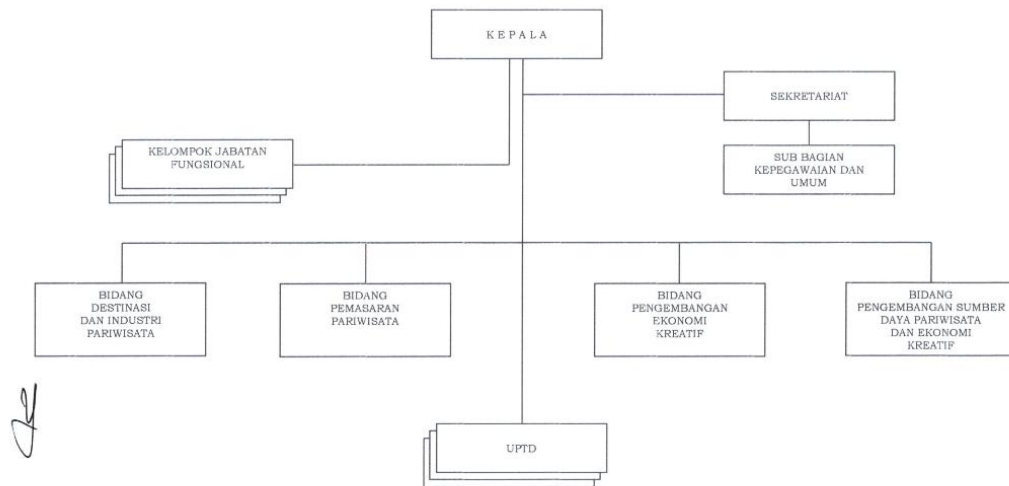
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
6. Kepala Bidang Pengembangan ekonomi Kreatif
7. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 98 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>V</i>

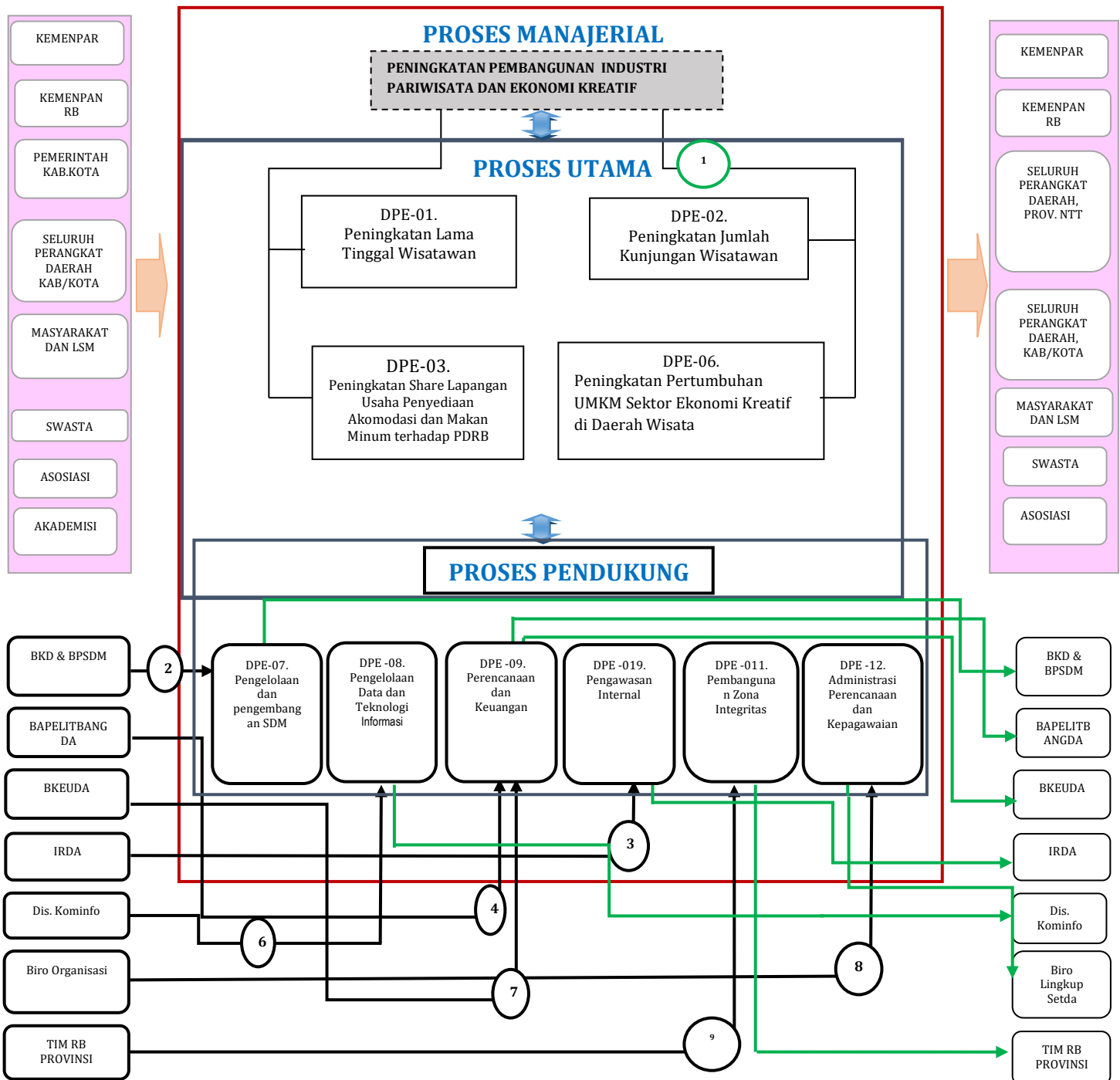
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia G. L. Kalake
AYODHIA G. L. KALAKE

V. Peta Proses Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor /KEP/HK/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2026.



Penjelasan Proses:

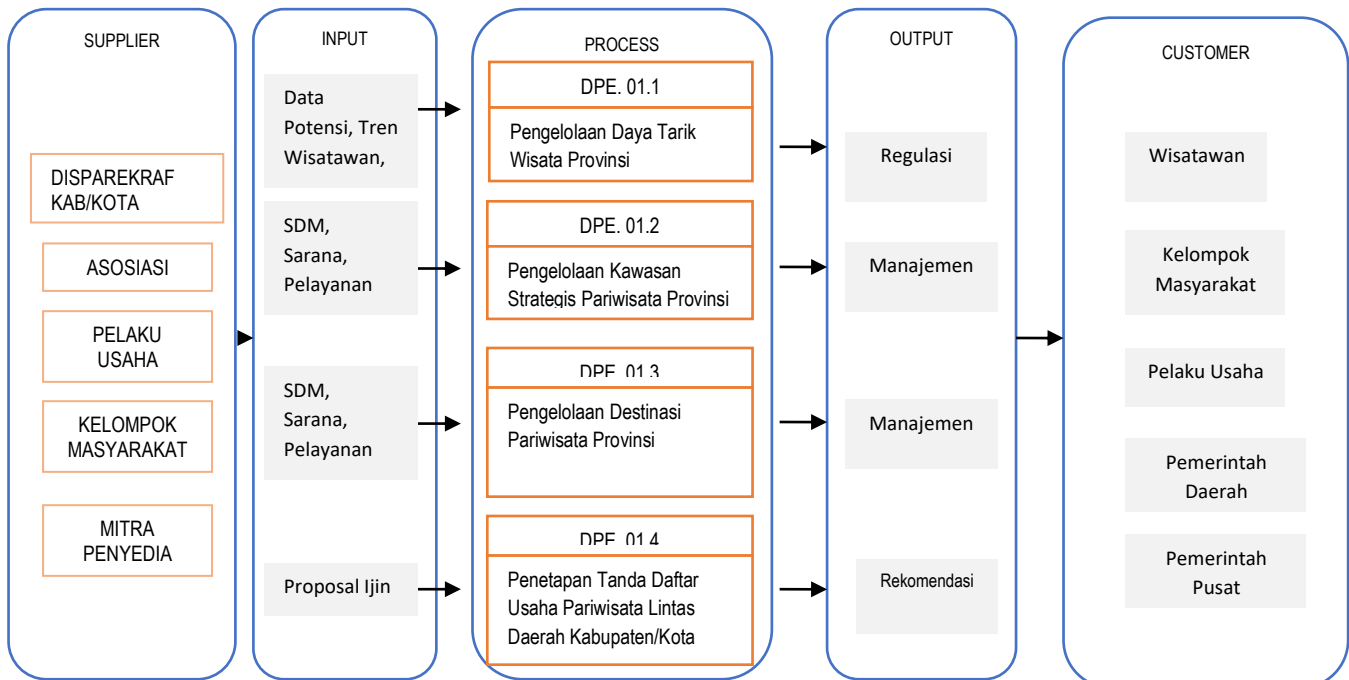
1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki empat target sasaran indikator dalam Rencana Pembangunan Daerah;
2. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
3. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
4. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;
6. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
7. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
8. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
9. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.

B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

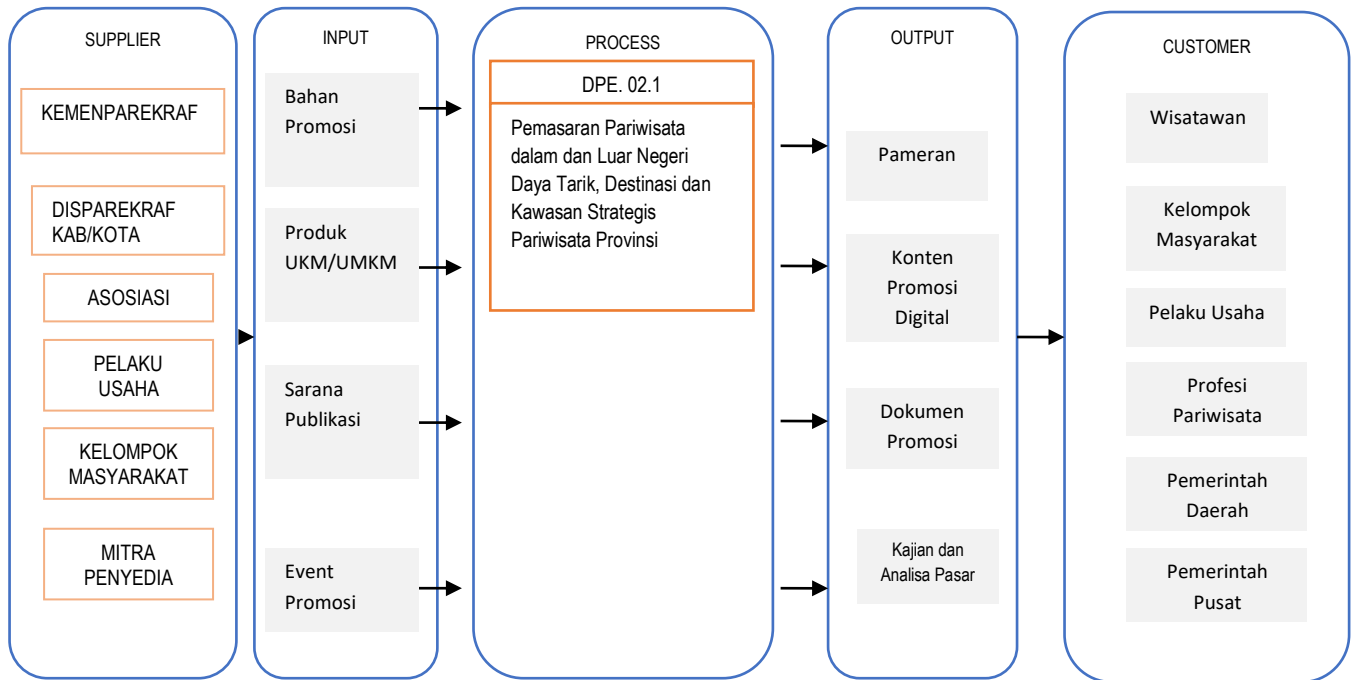
PETA SUB PROSES

DPE-01. PENINGKATAN LAMA TINGGAL WISATAWAN



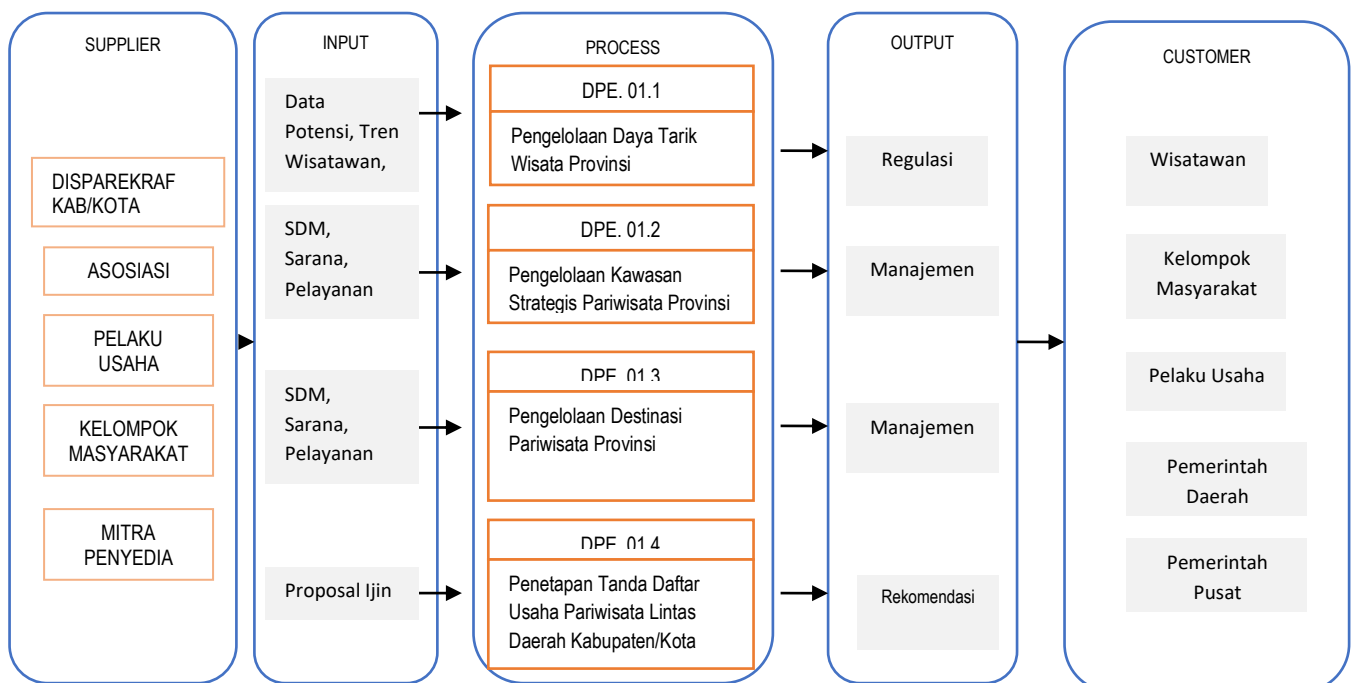
PETA SUB PROSES

DPE-02. PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN



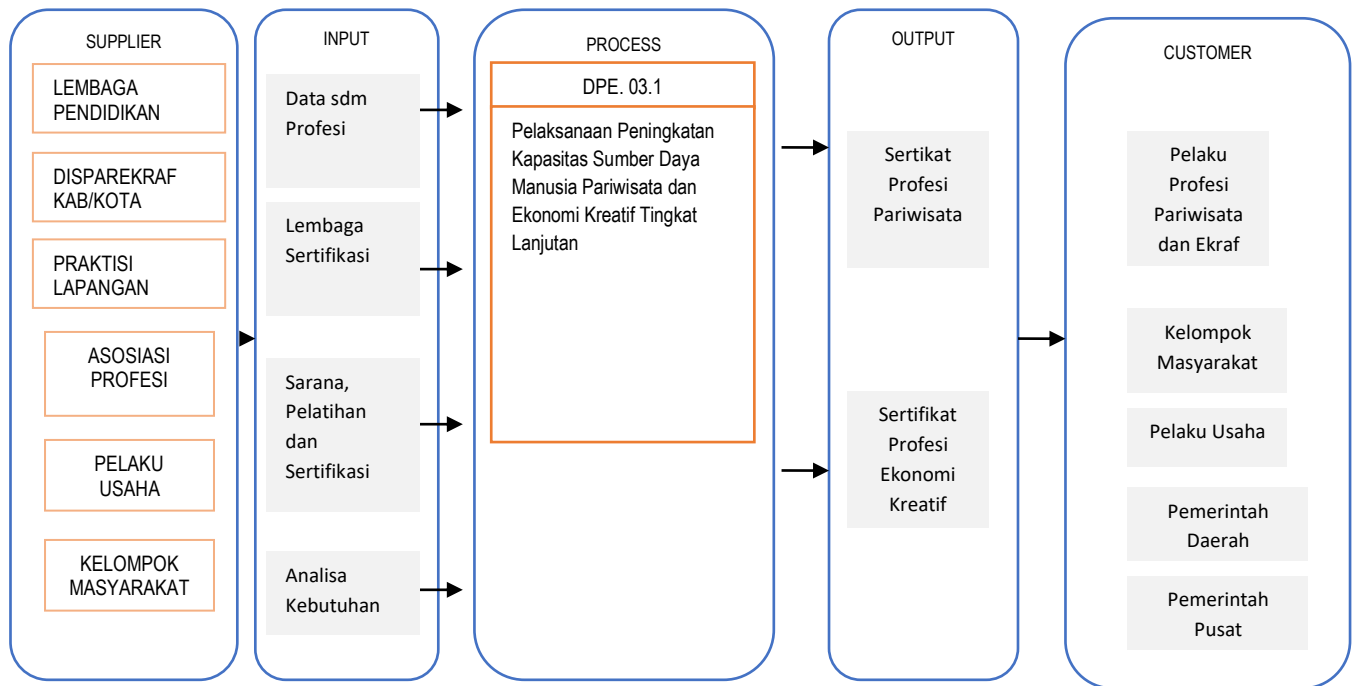
PETA SUB PROSES

DPE-03. PENINGKATAN SHARE LAPANGAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM TERHADAP PDRB



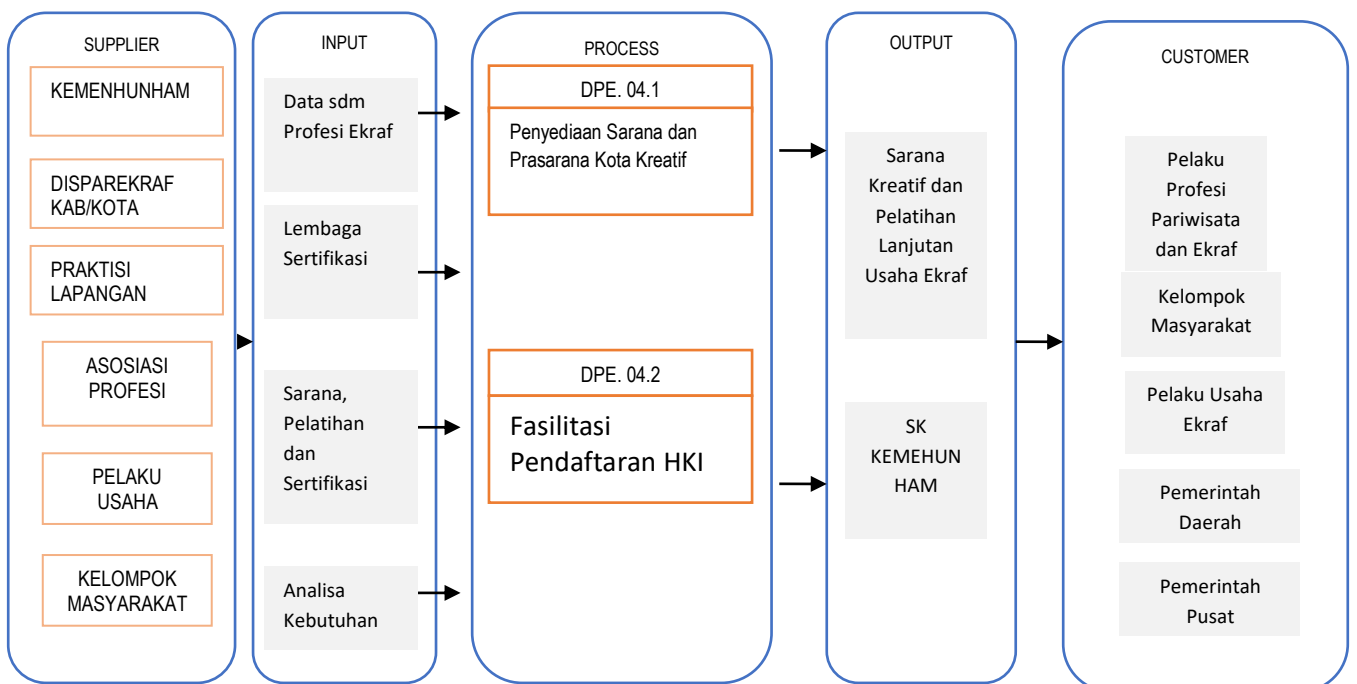
PETA SUB PROSES

DPE-03. PENINGKATAN SHARE LAPANGAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM TERHADAP PDRB



PETA SUB PROSES

DPE-06. Peningkatan Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)



C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

PROSES DPE 01
 SUB PROSES DPE 01.01
 LINTAS FUNGSI DPE 01.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3								4	5
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi										
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN	PELAKU BISNIS PARIWISATA		BAPPELITBANGDA		Surat Keputusan Gubernur Daya Tarik Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN	PELAKU BISNIS PARIWISATA	DLHD	BAPPELITBANGDA		Grand desain, Master Plan, DED dan Kajian AMDAL/UKL-UPL	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN	PELAKU BISNIS PARIWISATA	DLHD	BAPPELITBANGDA		Grand desain, Master Plan, DED dan Kajian AMDAL/UKL-UPL	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN							Laporan Monev Pengelolaan	DISPAREKRAF PROVINSI
	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provin										
1	Penetapan Kawasan Strategis	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN		LEMBAGA PENELITIAN			DLHD	BAPPELITBANGDA	Desain Pembangunan Data Tarik	DISPAREKRAF PROVINSI

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3								4	5
	Pariwisata Provinsi									Wisata Unggulan Provinsi	
2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN		LEMBAGA PENELITIAN			DLHD	BAPPELITBANGDA	Desain Pembangunan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN		LEMBAGA PENELITIAN			DLHD	BAPPELITBANGDA	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA	BPBJ	INSPEKTORAT				Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan StrategisProvinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN					DLHD	BAPPELITBANGDA	Desain pengembangan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN					Tata kelola kawasan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat	DISPAREKRAF PROVINSI
7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN		LEMBAGA PENELITIAN			DLHD	BAPPELITBANGDA	Konsep keberlanjutan pengelolaan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	LEMBAGA PENELITIAN	ASOSIASI PARIWISATA	DLHD	BAPPELITBANGDA		DISPAREKRAF PROVINSI
2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN		LEMBAGA PENELITIAN		DLHD		BAPPELITBANGDA	Desain Pembangunan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI

NO 1	KEGIATAN 2	UNIT KERJA TERKAIT 3								OUTPUT 4	PENANGGUNGJAWAB 5
3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN		LEMBAGA PENELITIAN		DLHD		BAPPELITBANGDA	Pengembangan destinasi pariwisata provinsi	
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA	LEMBAGA PENELITIAN	BPBJ	INSPEKTORAT			Penambahan Amenitas, Akomodasi dan Atraksi	DISPAREKRAF PROVINSI
5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN		LEMBAGA PENELITIAN					Laporan Monev Pengelolaan	DISPAREKRAF PROVINSI
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KELOMPOK MASYARAKAT					Pengembangan kapasitas kelompok dan lembaga pengelola destinasi pariwisata provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KELOMPOK MASYARAKAT					Penerapan pengelolaan wisata provinsi berkelanjutan	DISPAREKRAF PROVINSI
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	BADAN PELAYANAN SATU ATAP	KEMENPAREKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA				Tersedia layanan pendaftaran usaha lintas daerah	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	BADAN PELAYANAN SATU ATAP	KEMENPAREKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA				Fasilitasi pelaku bisnis pariwisata dalam mengakses layanan pendaftaran usaha lintas daerah	BADAN PELAYANAN SATU ATAP
3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	BADAN PELAYANAN SATU ATAP	KEMENPAREKRAF					Penambahan investasi pariwisata	BADAN PELAYANAN SATU ATAP

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

DPE 02
DPE 02.01
DPE 02.01.01

N O	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENAGGUNGJ AWAB
1	2	3								4	5
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	DISPARE KRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPARE KRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM	PERS		Penguatan promosi dan pemasaran produk daerah	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	DISPARE KRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPARE KRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM	PERS		Peningkatan kunjungan wisatawan dan bertambah rata-rata menginap	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	DISPARE KRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPARE KRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM			Kemudahan akses informasi	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	DISPARE KRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPARE KRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM	BIRO KERJASAMA	PERIND AG	Kerjasama lintas sektor	DISPAREKRAF PROVINSI

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

DPE 02
DPE 02.01
DPE 02.01.01

N O	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENAGGUNGJ AWAB
1	2	3								4	5
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM	PERS		Penguatan promosi dan pemasaran produk daerah	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM	PERS		Peningkatan kunjungan wisatawan dan bertambah rata-rata menginap	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM			Kemudahan akses informasi	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/U MKM	BIRO KEJASAMA	PERIND AG	Kerjasama lintas sektor	DISPAREKRAF PROVINSI

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

DPE 04
DPE 04.01
DPE 04.01.01

N O	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT							OUTPUT	PENAGGUNGJA WAB
1	2	3							4	5
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan									
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA			Pelatihan tingkat lanjutan/pra sertifikasi	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA			Legalitas pengelolaan kelembagaan/ Akta notaris dan terdaftar Kemenhumha m	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA			Jumlah sertifikasi profesi bidang home stay dan pemandu wisata	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM		Sertifikasi profesi pariwisata dan ekonomi kreatif	DISPAREKRAF PROVINSI
5	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM		Sertifikasi asesor	DISPAREKRAF PROVINSI
6	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ <i>Recognition Current Competencies</i> (RCC)	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM		Jumlah perpanjangan lisensi asesor	DISPAREKRAF PROVINSI
7	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM		Terbentuk LSP bidang pariwisata	DISPAREKRAF PROVINSI
8	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM	PERI NDA G	Peningkatan kualitas produk dan pasar	DISPAREKRAF PROVINSI
9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DISPAREK RAF PROVINSI	DISPAREKR AF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPA REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM	PERI NDA G	Peningkatan kompetensi pelaku ekraf	DISPAREKRAF PROVINSI

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

DPE 06
DPE 06.01
DPE 06.01.01

N O	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT							OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3							4	5
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif									
1	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA DAN EKRAF	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM	KEMENH UNHAM	Pengembangan IKM/UMKM bidang Ekraf dan Pendaftaran HKI dan IG	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA DAN EKRAF	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM	KEMENH UNHAM	Peningkatan jumlah penjualan IKM/UMKM ekraf	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA DAN EKRAF	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM	KEMENH UNHAM	Pengembangan kemitraan dan wadah kreatif IKM/UMKM	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA DAN EKRAF	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM	KEMENH UNHAM	Peningkatan nilai tambah produk	DISPAREKRAF PROVINSI
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	DISPAREKRAF PROVINSI	DISPAREKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA DAN EKRAF	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/ UMKM	KEMENH UNHAM	Peningkatan kapasitas dasar dan pemberian insentif	DISPAREKRAF PROVINSI

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

DPE 07
DPE 07.01
DPE 07.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT				OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3				4	5
	Pengelolaan dan Pengembangan SDM						
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPAREKRAF PROVINSI NTT	BKD Provinsi NTT	DINAS KOMINFO PROV NTT		Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	BKD Provinsi NTT	BKN PUSAT		Kenaikan Pangkat & Pensiunan ASN	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	BKD Provinsi NTT	BKN PUSAT		Disiplin Pegawai	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	BPSDM Provinsi NTT			Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	DISPAREKRAF PROV NTT

PROSES DPE 08
 SUB PROSES DPE 08.01
 LINTAS FUNGSI DPE 08.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT				OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3				4	5
	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPAREKRAF PROVINSI NTT	DINAS KOMINFO PROV NTT	Pelaku usaha terkait Jaringan Intenet		Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	DINAS KOMINFO PROV NTT	BAPELITBANGDA PROV NTT	DPMTSP PROV NTT	Pengelolaan Website, aplikasi E- Monev, aplikasi PPID, aplikasi SIPD, aplikasi Perizinan OSS, aplikasi E-Nadi	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	Disparekraf Kab/Kota	BAPELITBANGDA PROV NTT	BPS PROVINSI NTT	Tersedianya database kepariwisataan dan ekonomi kreatif	DISPAREKRAF PROV NTT

PROSES DPE 09
 SUB PROSES DPE 09.01
 LINTAS FUNGSI DPE 09.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT				OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3				4	5
	Perencanaan dan Keuangan						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPAREKRAF PROVINSI NTT	BADAN KEUANGAN DAERAH PROV NTT	BAPELITBANGDA PROV NTT	Inspektorat Daerah PROV NTT	Penatausahaan Keuangan	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	BAPELITBANGDA PROV NTT	BADAN KEUANGAN DAERAH PROV NTT	Biro Lingkup Setda Prov NTT	Perencanaan dan Pelaporan	DISPAREKRAF PROV NTT

PROSES DPE 019
 SUB PROSES DPE 019.01
 LINTAS FUNGSI DPE 019.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT				OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3				4	5
	Pengawasan Internal						
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPAREKRAF PROVINSI NTT	INSPEKTORAT DAERAH PROV NTT	BIRO ORGANISASI SETDA PROV NTT	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prov NTT	Pelaksanaan SPIP	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	TIM AUDIT ISO			Pelaksanaan SMM ISO 9001:2015	DISPAREKRAF PROV NTT

PROSES DPE 011
 SUB PROSES DPE 011.01
 LINTAS FUNGSI DPE 011.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT				OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3				4	5
	Pembangunan Zona Integritas						
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPAREKRAF PROVINSI NTT	TIM RB PROV NTT	BIRO ORGANISASI SETDA PROV NTT		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPAREKRAF PROV NTT
		DISPAREKRAF PROVINSI NTT	TIM ZI PROV NTT	INSPEKTORAT DAERAH		Terwujudnya zona integritas lingkup Disparekraf Prov NTT	DISPAREKRAF PROV NTT

PROSES DPE 12
 SUB PROSES DPE 012.01
 LINTAS FUNGSI DPE 012.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT				OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3				4	5
	Administrasi Perencanaan dan Kepegawaian						
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPAREKRAF PROVINSI NTT	BIRO ORGANISASI SETDA PROV NTT	KEMENPAN RB	BKN PUSAT	Perencanaan dan Formasi Pegawai	DISPAREKRAF PROV NTT

D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

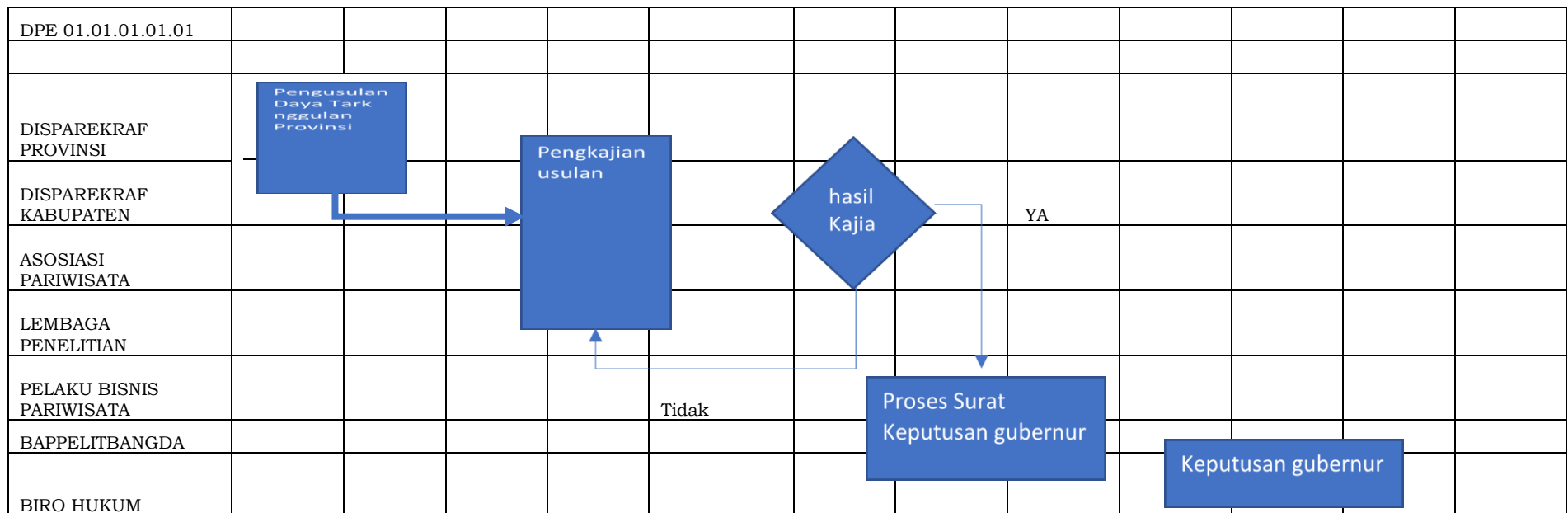
Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

DPE 01.01.01.01

Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

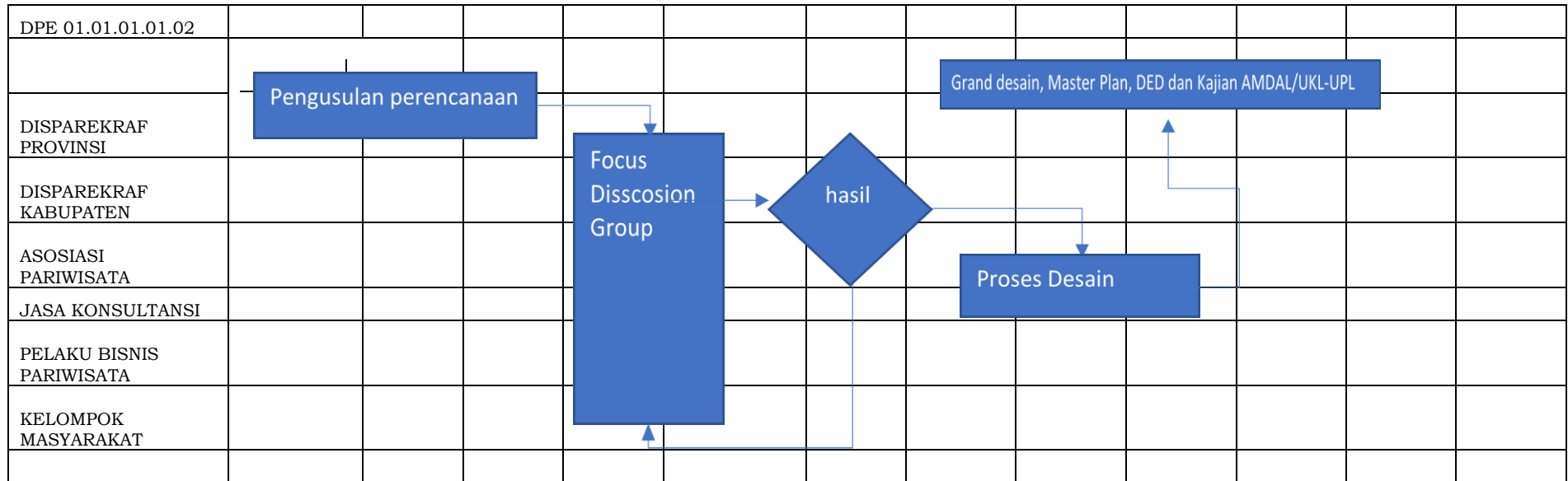
DPE 01.01.01.01.01

Penetapan Regulasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi



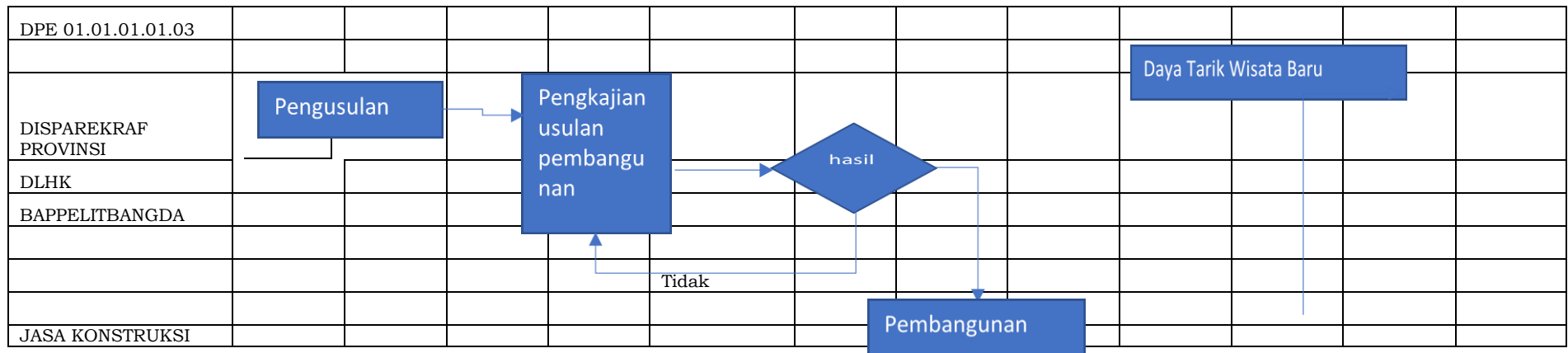
DPE 01.01.01.01
DPE 01.01.01.01.02

Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi



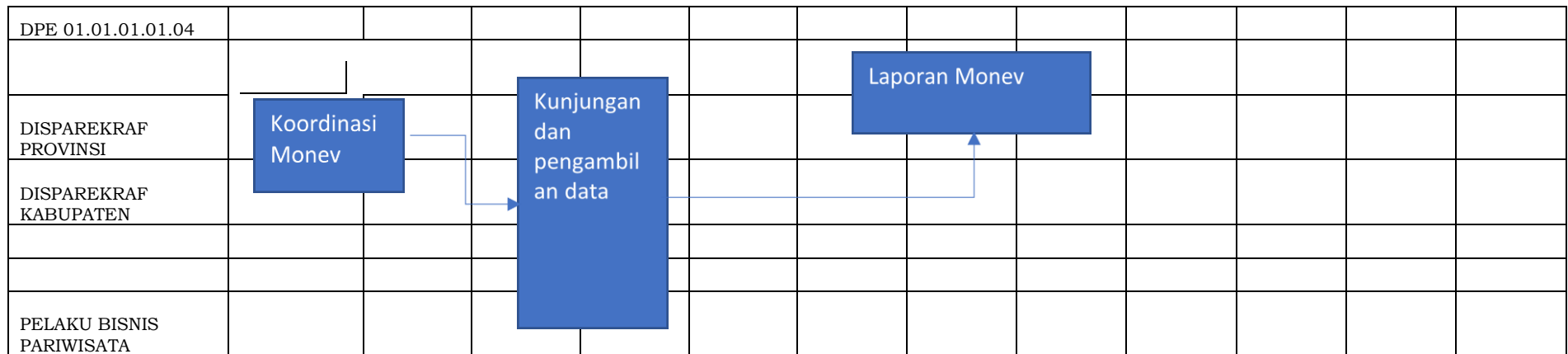
DPE 01.01.01.01
DPE 01.01.01.01.03

Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi



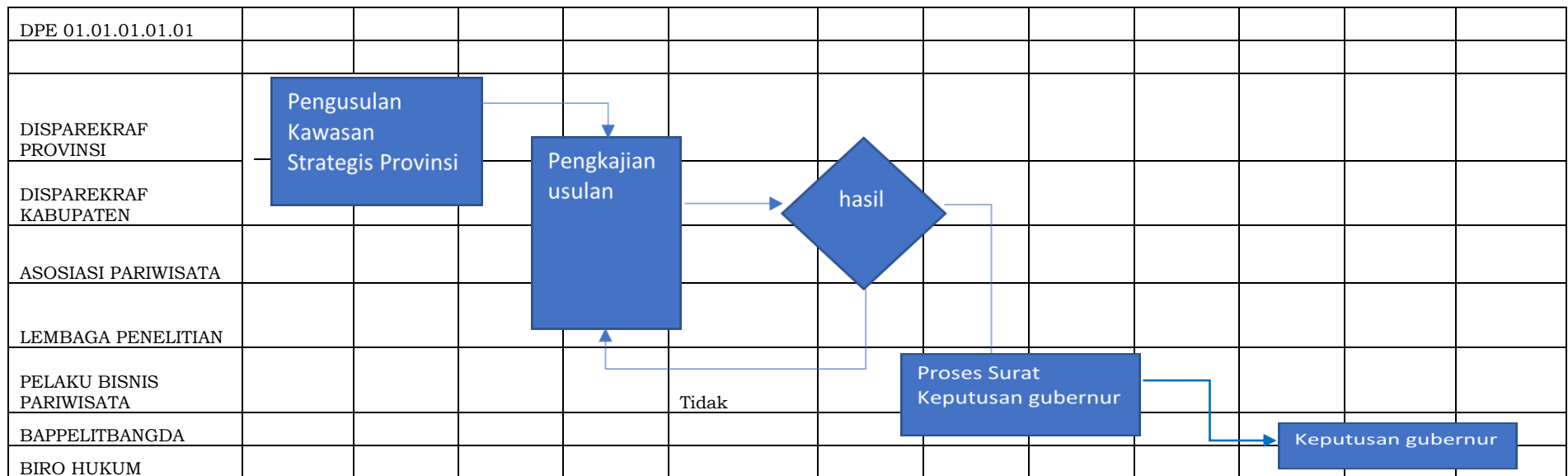
DPE 01.01.01.01
DPE 01.01.01.01.04

Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi



DPE 01.01.01.02
DPE 01.01.01.02.01

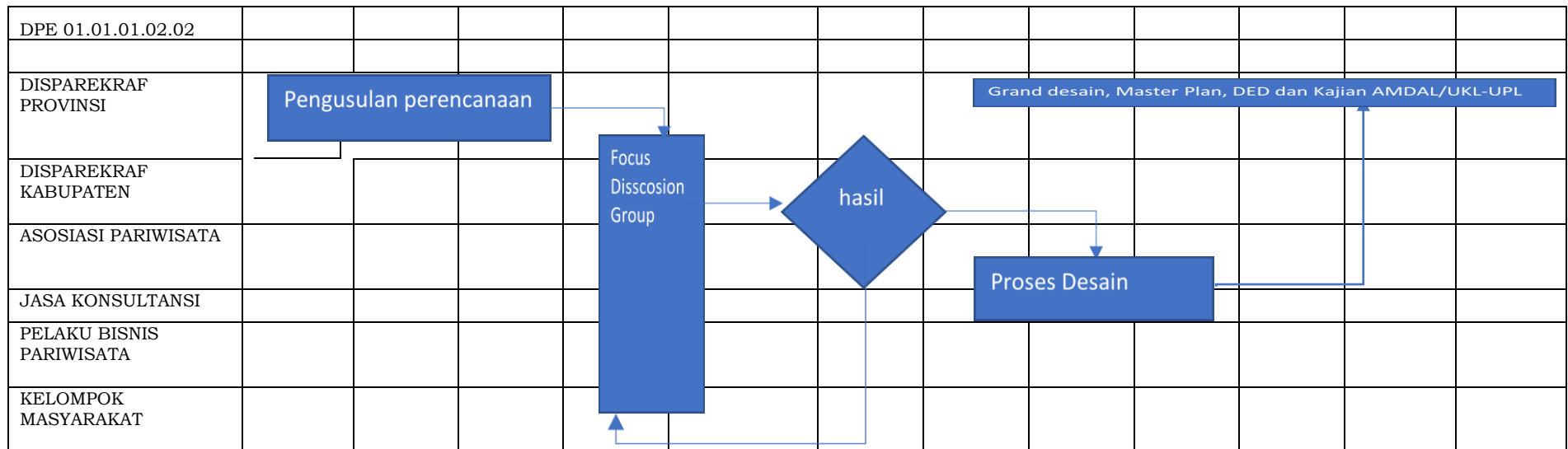
Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



DPE 01.01.01.02

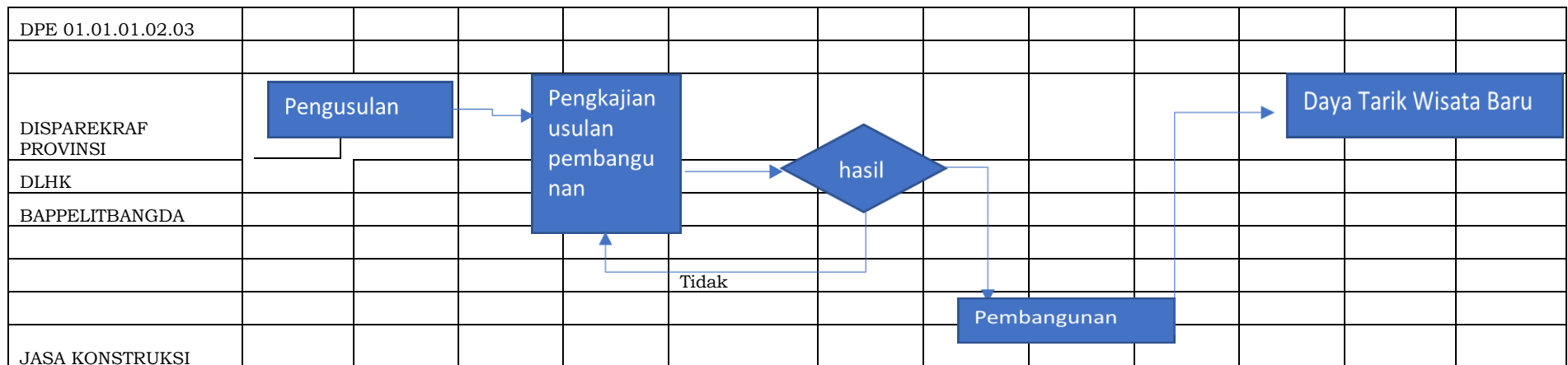
DPE 01.01.01.02.02

Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



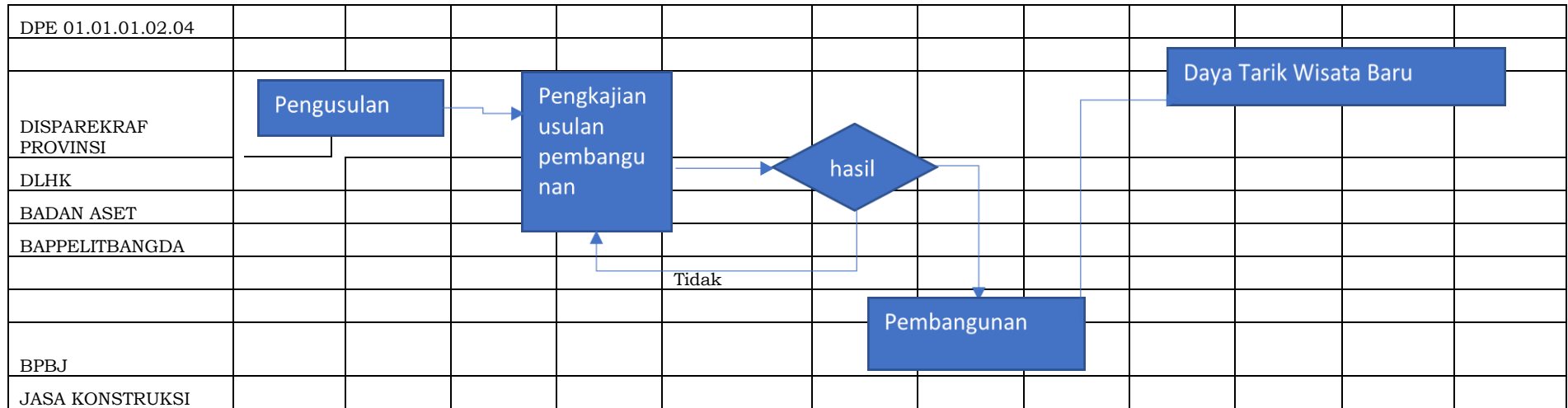
DPE 01.01.01.02
DPE 01.01.01.02.03

Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



DPE 01.01.01.02
DPE 01.01.01.02.04

Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



DPE 01.01.01.02
DPE 01.01.01.02.05

Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



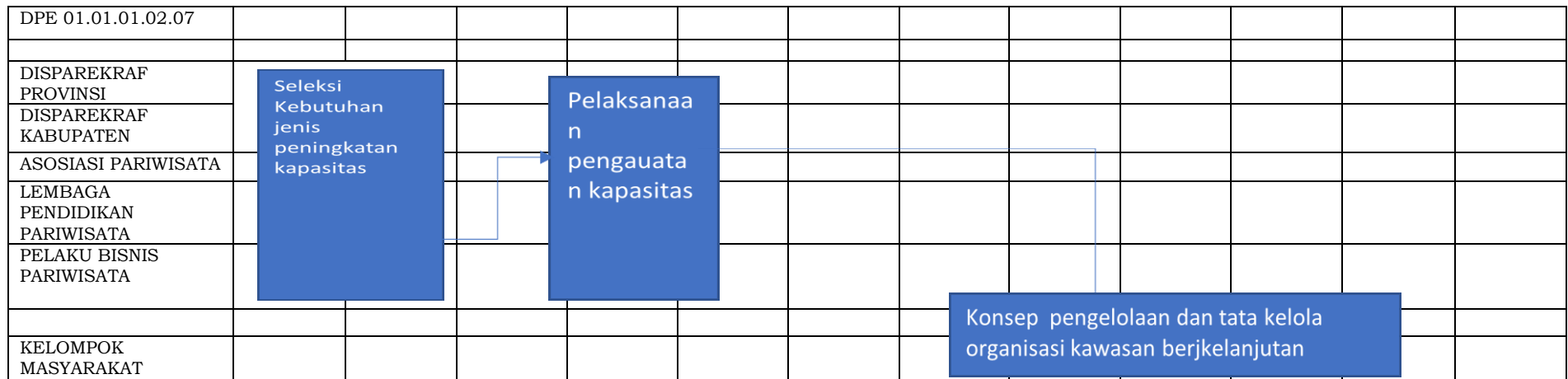
DPE 01.01.01.02
DPE 01.01.01.02.06

Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



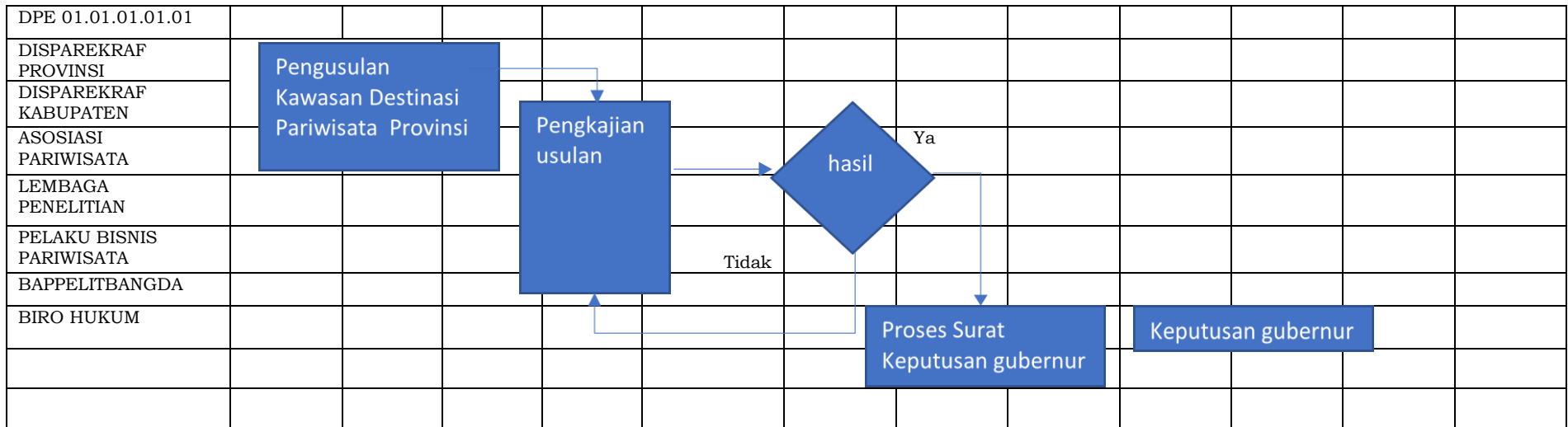
DPE 01.01.01.02
DPE 01.01.01.02.07

Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



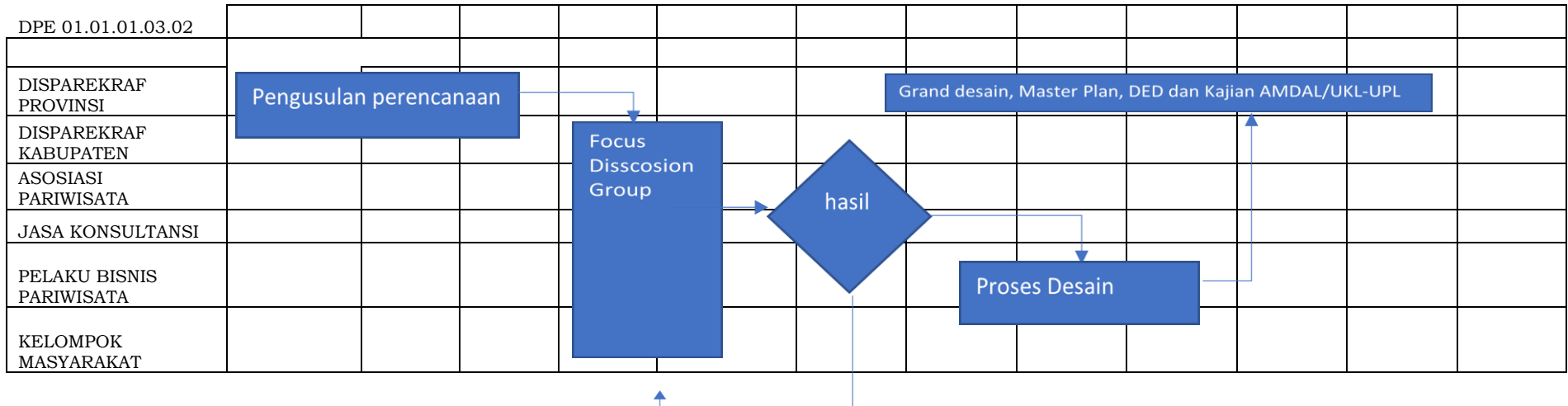
DPE 01.01.01.03
DPE 01.01.01.03.01

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi



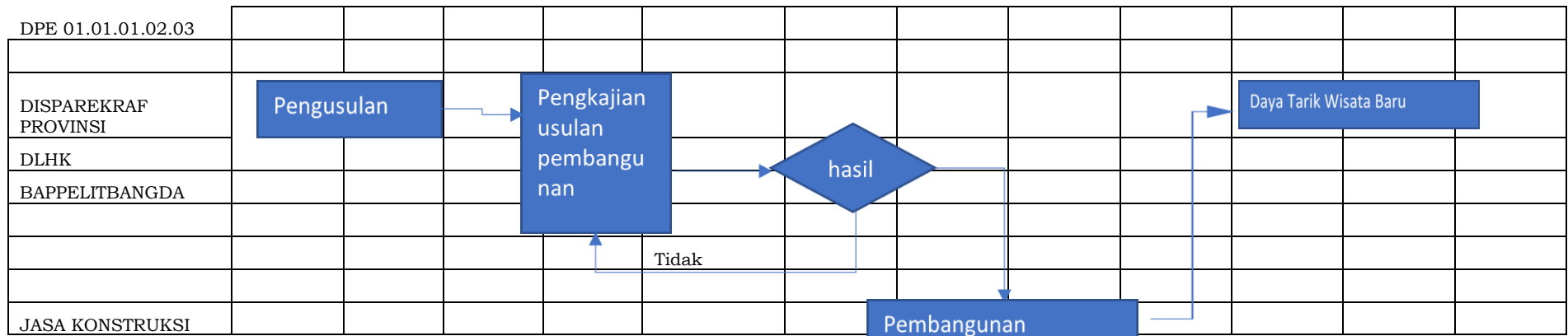
DPE 01.01.01.03
DPE 01.01.01.03.02

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi

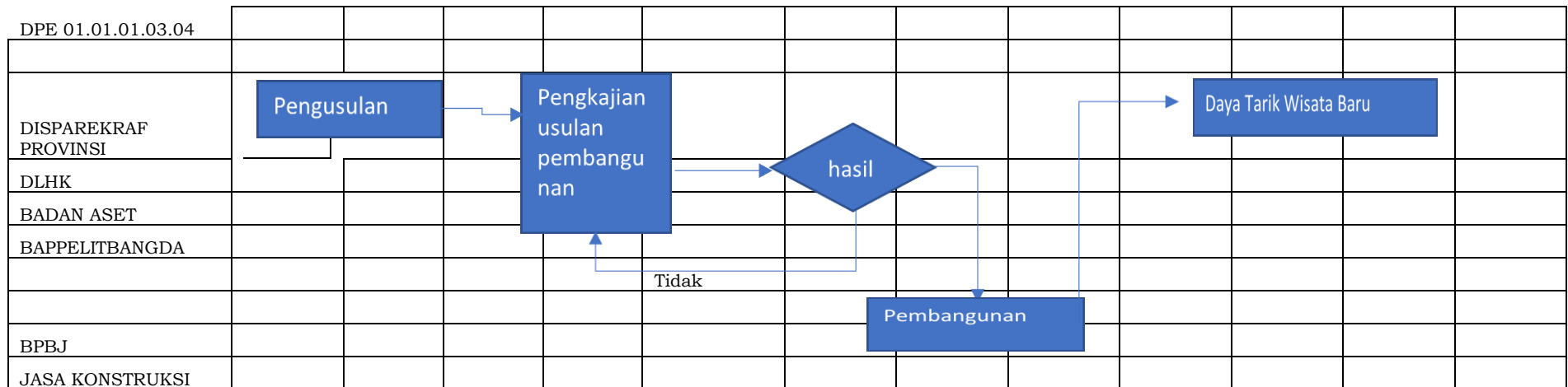


DPE 01.01.01.03**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi****DPE 01.01.01.03.03****Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi**

DPE 01.01.01.02.03

**DPE 01.01.01.03****Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi****DPE 01.01.01.03.04****Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**

DPE 01.01.01.03.04



DPE 01.01.01.03

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

DPE 01.01.01.03.05

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi



DPE 01.01.01.03

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

DPE 01.01.01.03.06

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri



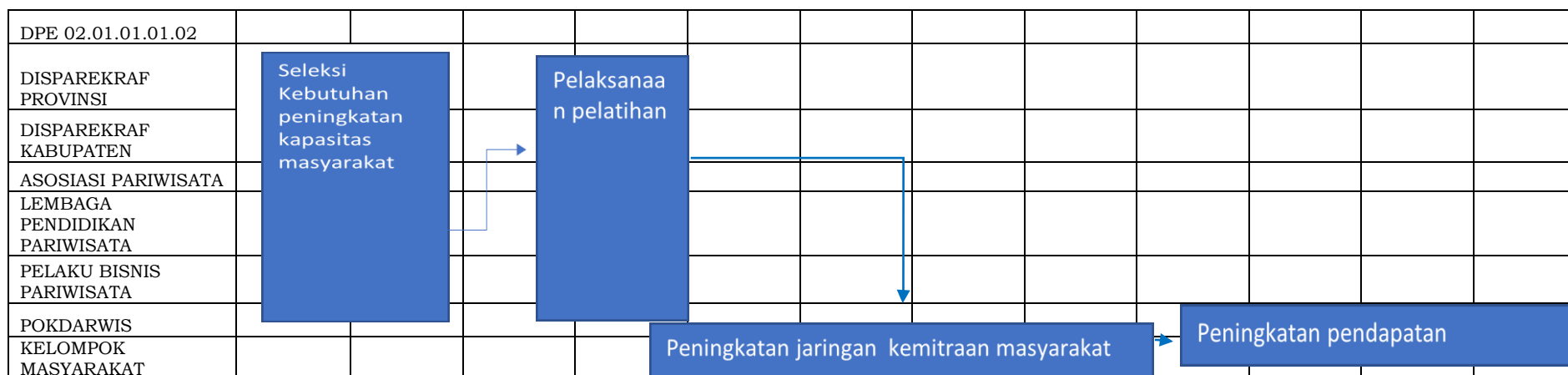
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan



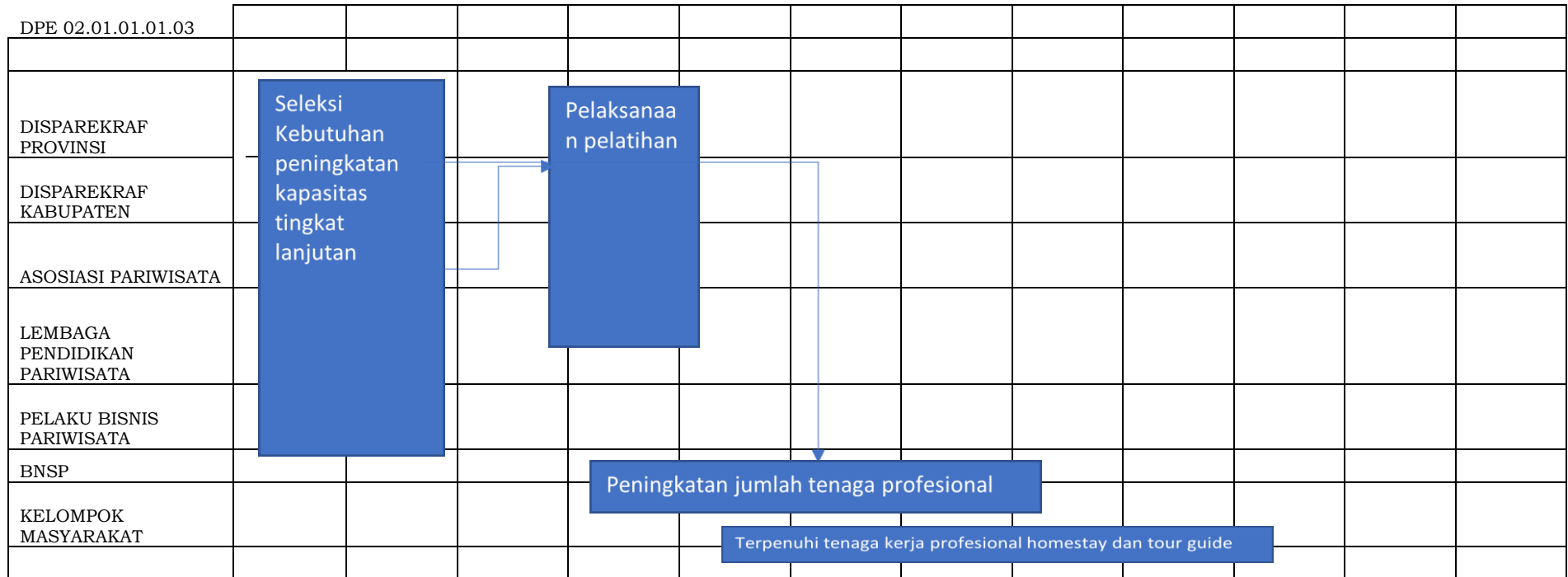
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata



DPE 04.01.01.01
DPE 04.01.01.01.03

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan

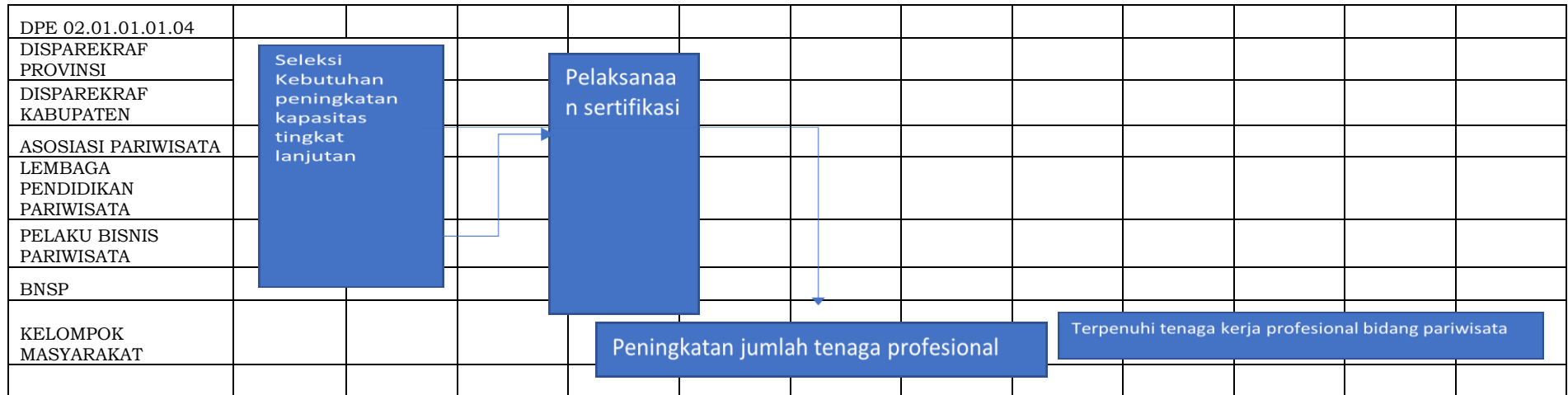


DPE 04.01.01.01

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

DPE 04.01.01.01.04

Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata



DPE 04.01.01.01

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

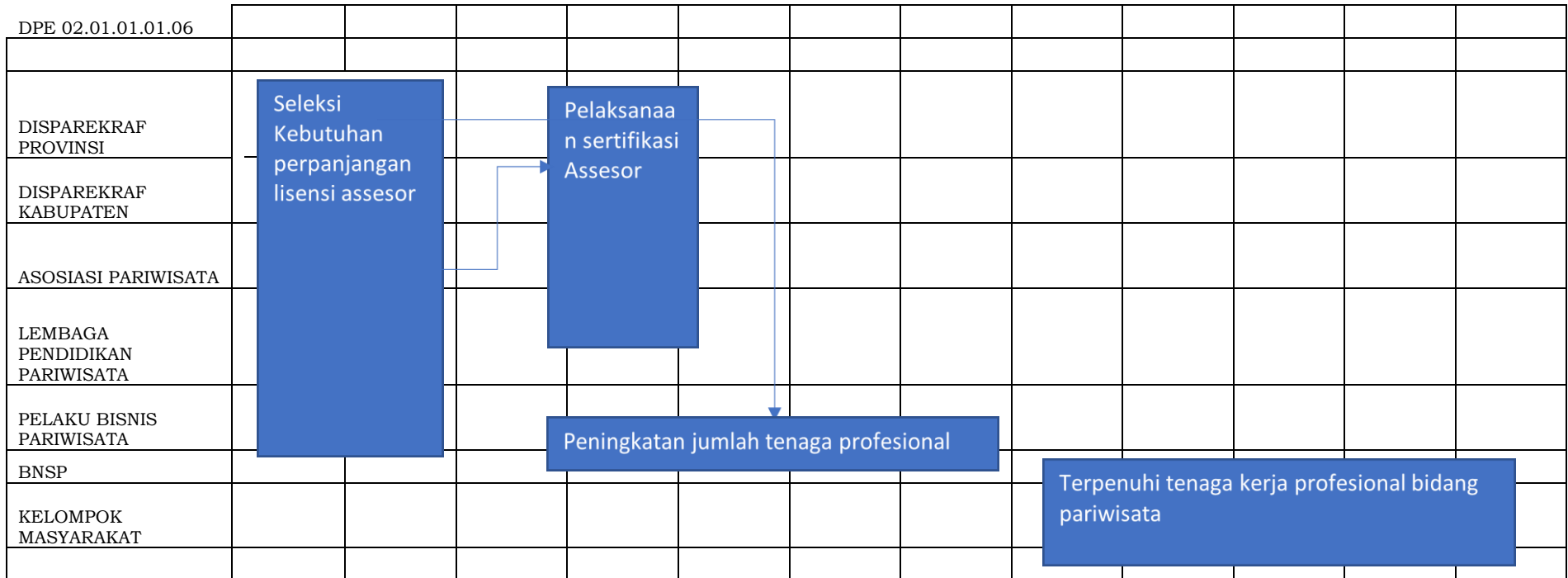
DPE 04.01.01.01.05

Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)



DPE 04.01.01.01
DPE 04.01.01.01.06

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang – NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

 parekrafntt.id  [Dinas Pariwisata Provinsi NTT](#)  [@tourism.ntt](#)  [@disparekrafNTT](#)  [Dinas Parekraf NTT](#)

